



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

Prepared by :
**Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-eldperakim.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Februari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

LKjIP ini tersusun berkat kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Namun kami menyadari akan adanya segala kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan LKjIP yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwodadi, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN




ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730726 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	10
C. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.....	17
D. Landasan Hukum	19
E. Sistematika.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategis.....	23
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	30
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
D. Pohon Kinerja Tahun 2025	54
E. Crosscutting Disperakim	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. Pengukuran Kinerja	57
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	59
C. Realisasi Keuangan dan Fisik.....	92
D. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	97
BAB IV PENUTUP	114

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi</i>	<i>15</i>
--	-----------



DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan per Desember 2025</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 1. 2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan per Desember 2025.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahun 2025.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 2. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 2. 6 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya....</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 3. 4 Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....</i>	<i>66</i>
<i>Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional</i>	<i>68</i>
<i>Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi</i>	<i>69</i>
<i>Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....</i>	<i>82</i>
<i>Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan</i>	<i>89</i>
<i>Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan dan Fisik</i>	<i>92</i>
<i>Tabel 3. 10 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025</i>	<i>97</i>

Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025	99
Tabel 3. 12 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025	99
Tabel 3. 13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	100
Tabel 3. 14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	101
Tabel 3. 15 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025	103
Tabel 3. 16 Permasalahan dan Solusi SPM.....	104
Tabel 3. 17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	105
Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	107
Tabel 3. 19 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025	107
Tabel 3. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	108
Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	109
Tabel 3. 22 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	110
Tabel 3. 23 Permasalahan Dan Solusi SPM	111

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;

- e) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perumahan

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

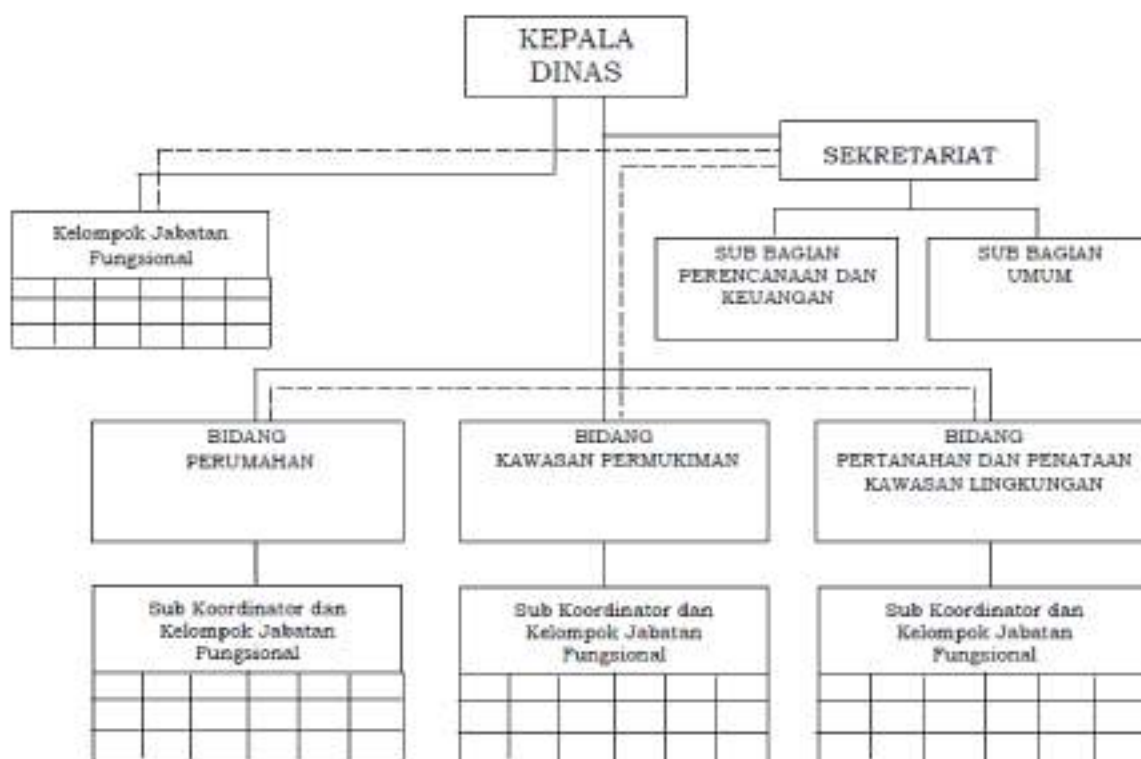
Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan standar, pedoman, kebijakan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan serta kawasan ibu kota kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang keahlian, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional

yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja, ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi dan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di Luar Dinas untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	ASN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gol. I	0	0	0
2	Gol. II	1	1	2
3	Gol. III	8	6	14
4	Gol. IV	3	2	5
5	PPPK	7	4	11
6	PW	8	7	15
Jumlah		27	20	47

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan per Desember 2025

No	Jenis Jabatan	Bidang					Jumlah
		Kepala Dinas	Sekretariat	Perumahan	Kawasan Permukiman	Pertanahan	
1	Pejabat Struktural	1	3	1	1	1	7
2	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)-PNS		1	2	3	1	7
	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)-PPK		1	3	4	2	10
3	Pejabat Fungsional Umum-PNS		4	1		1	6
	Pejabat Fungsional Umum-PPPK		1				1
	Pejabat Fungsional Umum-PW		6	1	5	3	15
4	Calon Pejabat Fungsional Tertentu-CPNS		1				1
5	Calon Pejabat Fungsional Umum-CPNS						0
Jumlah		1	17	8	13	8	47

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan per Desember 2025

C. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas, tidak ada staf teknis ASN, sebagian besar staf teknis merupakan Non ASN selain itu banyak pejabat ASN yang sudah purna tugas;
- b) Latar belakang pendidikan ASN kurang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama komputer, printer, scanner, gedung kantor dan kendaraan operasional baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua);
- d) Masih terdapat kesalahan dalam pencatatan aset daerah, terdapat aset yang seharusnya dikelola daerah menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaannya;
- e) Belum tersedianya sistem pengelolaan kepegawaian yang terjadwal;
- f) Pengelolaan arsip yang belum optimal karena belum ada depo arsip yang sesuai standart;

- g) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Permasalahan Bidang Perumahan
- a) Masih terdapat RTLH sebesar 37,12 % (146.184 unit) yang belum tertangani;
 - b) Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah;
 - c) Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan provinsi serta dana CSR swasta;
 - d) Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan;
 - e) Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.
3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman
- a) Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;
 - b) Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan permukiman;
 - c) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
 - d) Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan pemenuhan air bersih, terutama pada daerah rawan air bersih;
 - e) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat;
 - f) Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi;
 - g) Sulitnya memperoleh sumber mata air di beberapa wilayah tertentu;
 - h) Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;
 - i) Masih terdapat daerah rawan kekeringan yang belum terlayani air bersih.
4. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan
- a) Banyaknya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah;

- b) Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian “liar”;
- c) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah;
- d) Banyak tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Masih terdapat RTLH yang belum tertangani;
- 2. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK Bupati Grobogan No 600.1.14.4/1017/2025;
- 3. Banyak tanah berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah tetapi belum disertifikatkan;
- 4. Kurangnya kompetensi teknis sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, permasalahan/kendala dan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan disusun sebagai pedoman untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. Proses penyusunannya dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan para pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode satu tahun. Dalam Renja tersebut memuat program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Jabatan 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan		Persentase pemenuhan air minum. sanitasi dan rumah layak huni	75.98	76.38	76.77	77.17	77.57
		Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63.16	63.44	63.72	64	64.28
			Persentase kawasan kumuh	0.054	0.050	0.047	0.043	0.040
		Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	86.20	87.10	88.62	88.80	89.90
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	78.57	78.59	78.6	78.62	78.63
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	0	23.08	46.15	76.92	100
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Nilai SAKIP perangkat daerah	70	73	75	77	80

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
	yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	78	79	80	81	82

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100	$\frac{\text{Jumlah unit rumah layak huni}}{\text{jumlah total unit rumah}} \times 100 \%$	Renstra Disperakim
		Persentase kawasan kumuh	%	Luas kawasan kumuh (SK Bupati) dibagi luas wilayah dikali 100	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh (sesuai SK Bupati)}}{\text{jumlah total luas wilayah}} \times 100 \%$	Renstra Disperakim
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali 100	$\frac{\text{Jumlah Komulatif masyarakat RT yg dapat akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga kabupaten}} \times 100 \%$	Renstra Disperakim

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolali di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/ Kota dikali 100	$\frac{\text{Jumlah rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{rumah memiliki sambungan rumah dan airnya diolah IPALD}}{\text{jumlah rumah di rumah Kabupaten}} \times 100 \%$	Renstra Disperakim
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan dibagi jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemerintah Daerah dikali 100	$\frac{\text{Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan}}{\text{jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang}} \times 100 \%$	Renstra Disperakim

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 :

Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	77.17
	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	%	64
		Persentase kawasan kumuh	%	0.043
	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	88.90
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78.62
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	%	76.92
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	Skor	80

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan janji kinerja tahunan yang memiliki peran penting bagi pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Dokumen ini menjadi sarana untuk memperjelas arah dan hasil yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan program. Melalui perencanaan kinerja yang baik, instansi dapat menetapkan prioritas kegiatan secara lebih tepat, terutama dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran yang terbatas. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan dapat lebih terfokus dan terarah, sehingga tidak terdapat kegiatan yang berjalan tanpa tujuan yang jelas.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ditetapkan pada bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	64.00%
		Persentase kawasan kumuh	0,043%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	76.92%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80 Skor

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan :

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
1	2	3	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41,876,385,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			18,749,695,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88,9 %	6,064,516,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	6,064,516,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	12 Unit	-
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	-
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	300,000,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	320 Liter/Detik	5,764,516,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,71 %	12,685,179,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	352241 Rumah Tangga	12,685,179,000
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1065 Rumah Tangga	12,685,179,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23,126,690,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100 %	6,276,064,600
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	95,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	60,000,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	4,024,782,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3,976,742,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23,040,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	15,000,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	135,307,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8,007,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	127,300,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1,137,695,642
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	258,182,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38,456,642

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	149,216,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	651,841,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	137,982,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	137,982,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	551,320,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	208,480,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	332,840,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	193,977,958
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	158,977,958
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	35,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	278,208,000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	21,320,000
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50 Orang	21,320,000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	100 %	256,888,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit Rumah	256,888,000
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	-
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	44,66 %	1,900,000,000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	7 Ha	1,900,000,000
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	1,900,000,000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,91 %	5,077,478,400
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	300 unit	5,077,478,400

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	5,077,478,400
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100 %	9,594,939,000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	45,83 %	9,594,939,000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	34 Lokasi	9,584,339,000
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	8 Laporan	10,600,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			447,552,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			447,552,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp) 2025
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	74,43 %	447,552,000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	1 dok	447,552,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	447,552,000
JUMLAH			42,323,937,000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Penetapan Tahun 2025	Target Perubahan Tahun 2025
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	64.00%	64.10%
		Persentase kawasan kumuh	0,043%	0,043%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%	88.90%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	78.62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Penetapan Tahun 2025	Target Perubahan Tahun 2025
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	76.92%	76.92%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80 Skor	80 Skor

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Tabel 2. 7 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41,876,385,000	50,579,113,072
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				18,749,695,000	14,141,609,678
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	ersentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88,9 %	88,9 %	6,064,516,000	2,981,329,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	20 unit	6,064,516,000	2,981,329,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	12 Unit	60 Unit	-	500,000,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50,500,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	10 Liter/Detik	300,000,000	2,430,829,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	320 Liter/Detik	320 Liter/Detik	5,764,516,000	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,71 %	72,71 %	12,685,179,000	11,160,280,678
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	352241 Rumah Tangga	352241 Rumah Tangga	12,685,179,000	11,160,280,678
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1065 Rumah Tangga	937 Rumah Tangga	12,685,179,000	11,160,280,678
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				23,126,690,000	36,437,503,394
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100 %	100 %	6,276,064,600	6,909,775,744

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	100 %	95,000,000	136,013,400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	60,000,000	110,100,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	10,913,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	4,024,782,000	4,257,593,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3,976,742,000	4,219,553,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	23,040,000	23,040,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	5,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	100 %	135,307,000	55,793,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	8,007,000	49,775,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	51 Orang	127,300,000	6,018,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	1,137,695,642	1,027,919,386
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	24,862,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	258,182,000	223,768,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38,456,642	41,352,386
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	35,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	149,216,000	144,216,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	651,841,000	548,721,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	100 %	137,982,000	250,823,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30 Unit	137,982,000	250,823,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	100 %	551,320,000	1,022,941,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208,480,000	280,131,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	332,840,000	732,810,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	193,977,958	158,692,958
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	158,977,958	123,692,958
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	35,000,000	35,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	278,208,000	664,808,000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	21,320,000	-
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50 Orang	50 Orang	21,320,000	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	100 %	100 %	256,888,000	664,808,000
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit Rumah	150 Unit Rumah	256,888,000	597,504,000
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	-	67,304,000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	44,66 %	44,66 %	1,900,000,000	7,947,240,250
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	7 Ha	7 Ha	1,900,000,000	7,947,240,250
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	2.66 Ha	1,900,000,000	7,947,240,250
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,91 %	3,91 %	5,077,478,400	9,735,790,400
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	300 unit	300 unit	5,077,478,400	9,735,790,400

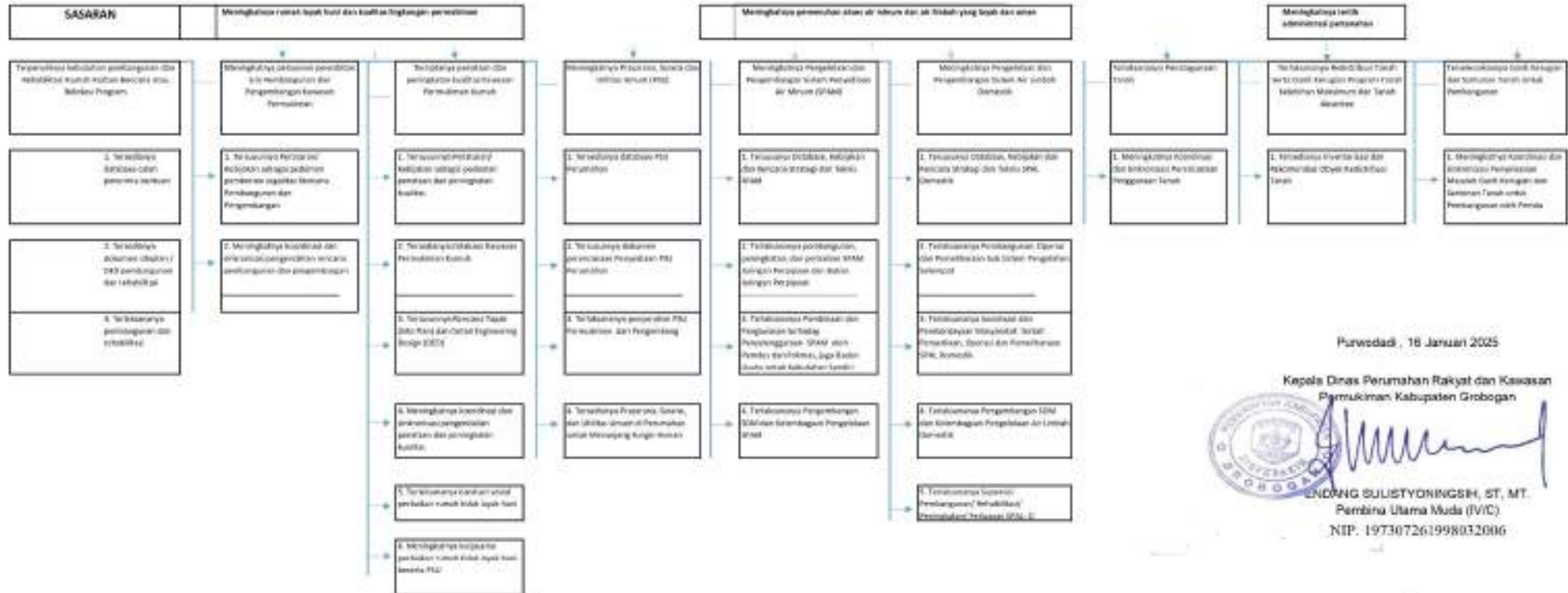
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	338 Unit Rumah	5,077,478,400	9,735,790,400
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	9,594,939,000	11,179,889,000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	45,83 %	45,83 %	9,594,939,000	11,179,889,000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	34 Lokasi	44 Lokasi	9,584,339,000	11,169,289,000
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	8 Laporan	8 Laporan	10,600,000	10,600,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				447,552,000	647,552,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp) 2025	
		Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERTANAHAN			447,552,000	647,552,000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	74,43 %	74,43 %	447,552,000	647,552,000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	1 dok	1 dok	447,552,000	647,552,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	447,552,000	647,552,000
JUMLAH				42,323,937,000	51,226,665,072

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

D. Pohon Kinerja Tahun 2025

POHON KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
MENGAMPU MISI KETIGA: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana



Purwodadi, 18 Januari 2025

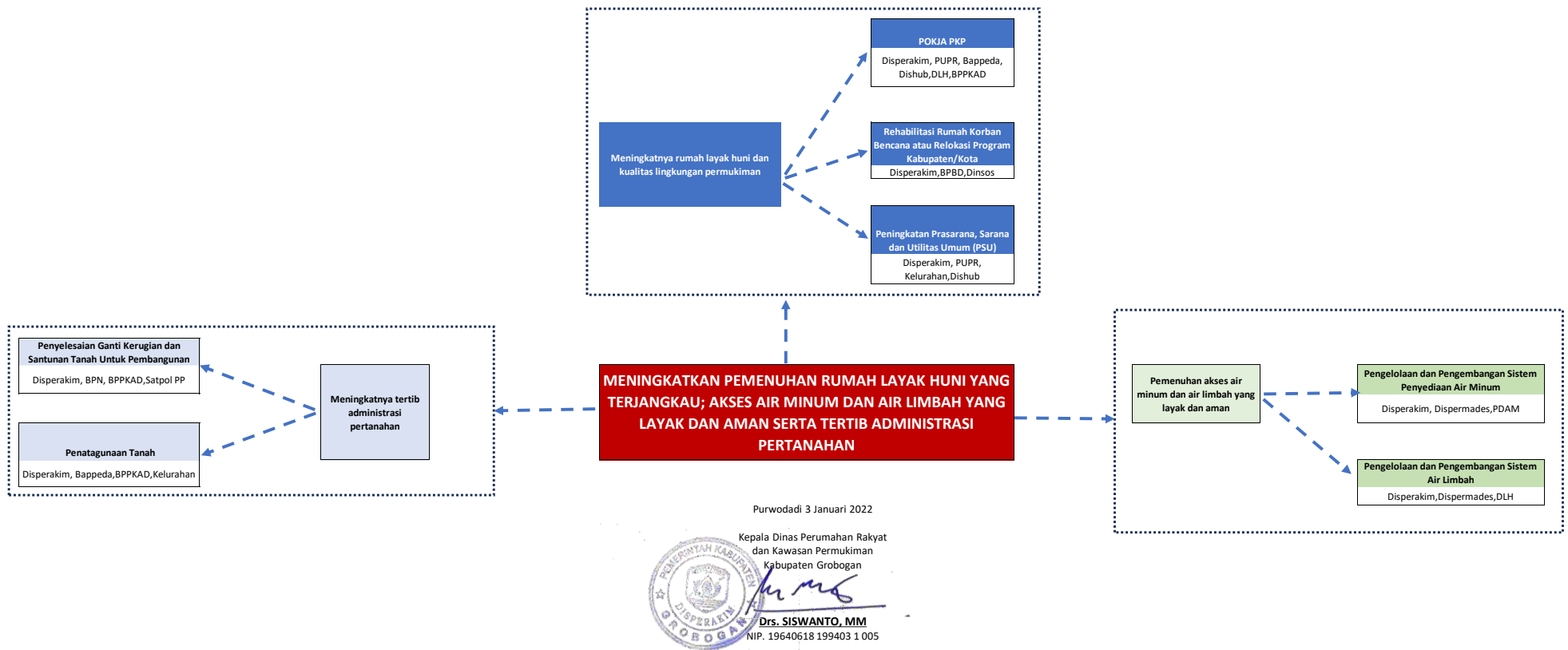
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan



ENDANG SULISTYONINGSIH, ST, MT.
 Pembina Utama Muda (IVIC)
 NIP. 197307261998032006

E. Crosscutting Disperakim

CROSSCUTTING DISPERAKIM KAB. GROBOGAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
					Capaian	
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	77.17%	77.79%	100.80%	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	64.10%	65.85%	102.73%	Sangat Tinggi
		Persentase kawasan kumuh	0.043%	0.041%	104.88%	Sangat Tinggi
1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%	88.90%	100.00%	Sangat Tinggi
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	78.62%	100.00%	Sangat Tinggi
1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	76.92%	87,23%	113.4%	Sangat Tinggi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
					Capaian	
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80 Skor	83 Skor	103.75%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 sebesar 100.8% dan termasuk kategori tinggi. Sasaran 1.1 pada tahun 2025 masing-masing sebesar 102,73% dan 104,88%, dengan rata-rata sebesar 103,81% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2 masing-masing sebesar 100% dan 100%, dengan rata-rata sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.3 sebesar 100% dan berada dalam kategori Sangat Tinggi. Dengan demikian, rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 adalah sebesar 101,90% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 adalah sebesar 103,75% dan juga berada dalam kategori Sangat Tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	76.38%	76.38%	100%	76.77%	77,03%	100,4%	77,17%	77,79%	100,80%
1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63.44%	65.16%	102.7%	63.72%	65,54%	102.9%	64.10%	65.85%	103%
		Persentase kawasan kumuh	0.050%	0.050%	100%	0.047%	0.047%	100%	0.043%	0.041%	105%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	87.10%	87.10%	100%	88.00%	88.60%	101%	88.90%	88.90%	100%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.59%	78.59%	100%	78.60%	78.64%	100%	78.62%	78.62%	100%
1.3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	23.08%	23.08%	100%	46.15%	46.15%	100%	76.92%	87.23%	113.4%
2	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen	Nilai IKM	73 Skor	70 Skor	96%	75 Skor	79 Skor	105.3%	80 Skor	83 Skor	104%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	administrasi perkantoran pemerintahan yang baik										

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, secara umum menunjukkan tren yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan capaian kinerja pada beberapa indikator. Indikator Tujuan 1 menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahunnya sebesar 100%, 100,4% dan pada tahun 2025 100,8%. Sasaran 1.1 yang terdiri atas dua indikator menunjukkan capaian sebesar 102.7% dan 100% pada tahun 2023, serta stabil sebesar 102.9% dan 100% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, kedua indikator tersebut mengalami peningkatan masing-masing menjadi 103% dan 105%.

Indikator Sasaran 1.2 yang juga terdiri atas dua indikator, pada tahun 2023 masing-masing mencapai 100% dan 100%. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 101% dan 100%. Namun demikian, pada tahun 2025 kedua indikator tersebut mengalami sedikit penurunan dan kembali berada pada angka 100% dan 100%. Indikator Sasaran 1.3 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu sebesar 100%. Sementara itu, Indikator Sasaran 2 pada tahun 2023 mencapai 96%, mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 105%, dan kembali penurunan sedikit pada tahun 2025 menjadi 104%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	77.79%	77.57%	100.28%
		Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	65.85%	64.28%	102.4%
			Persentase kawasan kumuh	0.041%	0.040%	97.6%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
		Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%	89.80%	99.0%
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	78.63%	100.0%
		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	87.23%	100.00%	87.23%
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pulik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	83 Skor	82	101.2%

Berdasarkan analisis tabel di atas, rata-rata tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Tujuan 1 mencapai 95,2%. Dengan capaian tersebut, potensi untuk mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat memungkinkan untuk direalisasikan. Secara rinci, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.1 masing-masing mencapai

102,4% dan 97,6%. Tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.2 masing-masing mencapai 99% dan 100%. Sementara itu, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.3 mencapai 87.23%. Adapun tingkat kemajuan Indikator Kinerja Tujuan 2 mencapai 101,2%, sehingga target jangka menengah tahun 2026 pada tujuan tersebut telah terlampaui. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 2.1 juga mencapai 101,2%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Target			Persentase capaian		Persentase capaian	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Nasional	Provinsi	Kabupaten	
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	67.00%	71.59%	64.00%	Nihil	Nihil	65.85%	Melebihi Target
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Nihil	42,93%	88.90%	Nihil	Nihil	88.90%	Sesuai Target
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Nihil	Nihil	76.92%	Nihil	Nihil	87.23%	Melebihi Target

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sebagaimana Tabel di atas, bahwa capaian kinerja Indikator Tujuan 1, 2 dan 3 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat provinsi/nasional/daerah lain, dikarenakan indikator

kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat Provinsi/Nasional/daerah sekitar.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
1	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	77.17%	77.79%	100.8%	a.	Faktor Keberhasilan : Adanya berbagai sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN, CSR, dan sumber sah lainnya. Dukungan ini memperkuat kapasitas pembiayaan sehingga program penyediaan rumah layak huni, air minum, dan sanitasi dapat direalisasikan secara lebih luas dan cepat.	a.	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam membangun rumah layak huni melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta pemberdayaan berbasis swadaya agar kualitas bangunan memenuhi standar kelayakan.
						b.	Komitmen pemerintah daerah yang kuat dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan	b.	Memberikan bantuan stimulan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap dan berkelanjutan.
								c.	Memfasilitasi akses kepemilikan rumah layak huni melalui

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga target kinerja dapat terlampaui. c. Partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya dan gotong royong memperkuat pelaksanaan program serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga mendukung keberlanjutan rumah layak huni dan layanan dasar. Faktor Kegagalan : a. Berkurangnya atau terlambatnya dukungan APBN/CSR serta keterbatasan APBD dapat menghambat pelaksanaan program. b. Koordinasi yang lemah dan keterbatasan SDM teknis dapat menyebabkan program tidak berjalan optimal. c. Wilayah terpencil, keterbatasan sumber air, dan risiko bencana dapat memperlambat pencapaian target.	berbagai skema bantuan pembiayaan dan dukungan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. d. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun kawasan untuk meningkatkan kualitas hunian, akses air minum, dan sanitasi. e. Mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga melalui pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan dan percepatan penanganan permukiman kumuh.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
1.1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	64.10%	65.85%	102.73%	a.	Faktor Keberhasilan : Optimalisasi sumber pendanaan, melalui dukungan APBD, APBN, CSR, dan sumber sah lainnya yang memperluas cakupan peningkatan rumah layak huni. Komitmen Pemerintah Daerah, melalui konsistensi program rehabilitasi RTLH, peningkatan PSU, dan penguatan kebijakan perumahan bagi MBR. Dukungan kebijakan nasional, yang mempercepat peningkatan kualitas permukiman dan penanganan kawasan kumuh. Partisipasi masyarakat, dalam perbaikan rumah dan penataan lingkungan guna mendukung keberlanjutan program.	a.	Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan pembangunan rumah layak huni. Rehabilitasi RTLH secara berkelanjutan, dengan mekanisme transparan dan berbasis data terpadu. Fasilitasi akses BP2BT, untuk mendorong kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat. Rehabilitasi dan relokasi rumah terdampak bencana, guna memastikan masyarakat tetap memiliki hunian yang aman dan layak.
						b.			
						c.			
						d.			
						a.	Faktor Kegagalan : Keterbatasan anggaran, sehingga penanganan RTLH		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
						a.	belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan.		
						b.	Data RTLH yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir, sehingga mempengaruhi ketepatan sasaran bantuan.		
						c.	Keterbatasan kemampuan swadaya penerima manfaat, baik tenaga maupun tambahan pembiayaan.		
						d.	Kendala teknis dan lokasi rumah, seperti akses sulit dan status lahan yang belum jelas.		
						e.	Dampak bencana alam, yang menambah jumlah RTLH setiap tahunnya.		
		Persentase kawasan kumuh	0.043%	0.041%	104.88%	a.	Faktor Keberhasilan : Komitmen Pemerintah Daerah melalui pengalokasian anggaran, perencanaan yang terarah, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh.	a.	Pembangunan dan rehabilitasi PSU permukiman (jalan lingkungan, drainase, dan talud) secara bertahap dan terintegrasi sesuai prioritas lokasi kumuh.
						b.	Pembangunan dan rehabilitasi	b.	Penguatan kolaborasi pendanaan, melalui sinergi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan
							infrastruktur permukiman (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan air bersih yang secara langsung menurunkan tingkat kekumuhan. c. Sinergi pendanaan dan program nasional, melalui dukungan APBN, provinsi, dan CSR untuk mempercepat peningkatan kualitas kawasan. d. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan permukiman guna menjamin keberlanjutan hasil penanganan.	APBD, APBN, dan CSR untuk memperluas cakupan penanganan. c. Peningkatan pengendalian tata ruang, guna mencegah munculnya kawasan kumuh baru akibat pembangunan yang tidak terencana.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						Faktor Kegagalan a. Belum optimalnya integrasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di beberapa lokasi, yang masih mempengaruhi indikator kekumuhan. b. Potensi munculnya titik kumuh baru akibat pertumbuhan permukiman dan belum optimalnya pengendalian tata ruang. c. Kesadaran masyarakat yang belum merata dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman. d. Pemutakhiran data dan monitoring kawasan kumuh yang memerlukan penguatan agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran.	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
					Capaian				
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%	88.90%	100.00%	a.	Faktor Keberhasilan a. Komitmen Pemerintah Daerah, melalui pengalokasian anggaran dan perencanaan program SPAM yang terarah dan berkelanjutan.	a.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi, guna memastikan pengembangan SPAM berjalan terarah, terpadu, dan sesuai kebutuhan wilayah.
						b.	Pengembangan dan optimalisasi SPAM, baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi, sehingga mampu menjangkau lebih banyak rumah tangga.	b.	Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat, melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan agar pengelolaan lebih profesional dan berkelanjutan.
						c.	Sinergi pendanaan dan program, melalui dukungan APBD, APBN, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.	c.	Pengembangan dan pengelolaan SPAM perpipaan dan non perpipaan terlindungi, meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
						a.	Faktor Kegagalan Keterbatasan anggaran pengembangan SPAM, sehingga perluasan jaringan perpipaan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.		jaringan, serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan.
						b.	Kondisi geografis dan sebaran permukiman, terutama di wilayah terpencil, yang menyulitkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan.		
						c.	Kapasitas dan keberlanjutan operasional penyelenggara SPAM, termasuk kebutuhan peningkatan sarana, prasarana, dan manajemen layanan.		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
					Capaian				
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	78.62%	100.00%	a.	Faktor Keberhasilan a. Komitmen Pemerintah Daerah, melalui perencanaan dan penganggaran yang konsisten dalam peningkatan layanan pengolahan air limbah domestik.	a.	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sanitasi, agar pembangunan layanan air limbah lebih terarah dan sesuai prioritas kebutuhan wilayah.
						b.	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sanitasi, baik sistem setempat (onsite) maupun terpusat (offsite), sesuai kebutuhan wilayah.	b.	Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur air limbah domestik, baik sistem setempat (onsite) maupun terpusat (offsite), termasuk optimalisasi operasi dan pemeliharaan sarana yang telah terbangun.
						c.	Perubahan perilaku masyarakat, termasuk dukungan terhadap program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sehingga meningkatkan akses sanitasi yang layak dan aman.	c.	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola, melalui pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan keberlanjutan layanan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						Faktor Kegagalan: a. Sebaran permukiman dan kondisi geografis, yang menyulitkan penerapan sistem pengolahan air limbah terpusat di beberapa lokasi. b. Kapasitas pengelolaan dan pemeliharaan sarana, yang masih perlu ditingkatkan agar layanan berjalan berkelanjutan. c. Kesadaran dan perilaku masyarakat yang belum merata, terutama dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana sanitasi serta penerapan pola hidup bersih dan sehat.	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
					Capaian				
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	76.92%	87.23%	113.4%	a.	Faktor Keberhasilan : Pelaksanaan sertifikasi tanah secara massal, yang mempercepat proses legalisasi lahan PSU dari pengembang.	a.	Penyusunan dokumen inventarisasi obyek pertanahan, sebagai dasar penataan, pengamanan, dan percepatan proses sertifikasi lahan PSU.
						b.	Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti BPN, BPPKAD (Bidang Aset), dan kelurahan/desa dalam proses verifikasi, pencatatan, dan penerbitan sertifikat.	b.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan pertanahan, melalui peningkatan kompetensi aparatur serta penataan sistem administrasi aset daerah.
						c.	Pendataan dan inventarisasi aset tanah Pemkab secara tertib, sehingga lahan PSU yang telah diserahterimakan dapat segera diproses sertifikasinya.	c.	Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan, kepada pengembang dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban penyerahan fasum/fasos dan proses legalisasi tanah.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
					Capaian				
						a.	Faktor Keberhasilan : Masih adanya pemanfaatan tanah negara secara tidak sah (hunian liar), yang menghambat proses penertiban dan sertifikasi lahan.		
						b.	Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, sehingga memperlambat proses administrasi.		
						c.	Masih terdapat lahan fasos dan fasus dari pengembang yang belum bersertifikat, meskipun telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.		
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi	Nilai IKM	80 Skor	83 Skor	103.75%	a.	Faktor Keberhasilan : Kejelasan pembagian kewenangan, tugas, dan fungsi, yang didukung oleh peraturan, pedoman, juklak, dan juknis pada setiap operasional kegiatan sehingga pelayanan berjalan lebih terstruktur dan akuntabel.	a.	Penguatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja agar lebih efektif, efisien, dan berbasis data.
								b.	Peningkatan kapasitas SDM teknis, melalui pelatihan dan pembinaan guna mendukung profesionalitas pelayanan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan /Kegagalan		Solusi yang Dilakukan	
	perkantoran pemerintahan yang baik					b. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen, yang mendorong peningkatan disiplin, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. c. Penguatan kelembagaan secara berkelanjutan, melalui penataan organisasi dan peningkatan sistem administrasi perkantoran.		c.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah, dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
						Faktor Kegagalan : a. Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk belum tersedianya staf teknis ASN yang memadai serta adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas.			
						b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, seperti keterbatasan komputer, printer, scanner, gedung kantor, serta kendaraan operasional yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.			

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100	100	100	51,276,665,072	47,825,727,083	93.27	6.73	51,276,665,072	3,450,937,989	Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100	100	100	50,629,113,072	47,220,386,898	93.27	6.73	50,629,113,072	3,408,726,174	Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100	100	100	14,091,109,678	13,759,202,857	97.64	2.36	14,091,109,678	331,906,821	Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100	100	100	2,930,829,000	2,741,837,250	93.55	6.45	2,930,829,000	188,991,750	Efisien
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	2,930,829,000	2,741,837,250	93.55	6.45	2,930,829,000	188,991,750	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	100	100	100	500,000,000	447,715,500	89.54	10.46	500,000,000	52,284,500	Efisien
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	100	100	2,430,829,000	2,294,121,750	94.38	5.62	2,430,829,000	136,707,250	Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100	100	100	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	1.28	11,160,280,678	142,915,071	Efisien
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	1.28	11,160,280,678	142,915,071	Efisien
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100	100	100	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	1.28	11,160,280,678	142,915,071	Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100	100	100	36,538,003,394	33,461,184,041	91.58	8.42	36,538,003,394	3,076,819,353	Efisien
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	6,909,775,744	6,492,311,740	93.96	6.04	6,909,775,744	417,464,004	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	136,013,400	128,103,500	94.18	5.82	136,013,400	7,909,900	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	110,100,000	102,713,500	93.29	6.71	110,100,000	7,386,500	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	15,000,000	14,680,000	97.87	2.13	15,000,000	320,000	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	10,913,400	10,710,000	98.14	1.86	10,913,400	203,400	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	4,257,593,000	4,030,462,990	94.67	5.33	4,257,593,000	227,130,010	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	4,219,553,000	3,992,716,990	94.62	5.38	4,219,553,000	226,836,010	Efisien
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	23,040,000	22,906,000	99.42	0.58	23,040,000	134,000	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	100	10,000,000	9,870,000	98.70	1.30	10,000,000	130,000	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	100	100	100	5,000,000	4,970,000	99.40	0.60	5,000,000	30,000	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	55,793,000	54,949,200	98.49	1.51	55,793,000	843,800	Efisien
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	100	100	49,775,000	49,084,200	98.61	1.39	49,775,000	690,800	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	100	100	6,018,000	5,865,000	97.46	2.54	6,018,000	153,000	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1,027,919,386	960,414,648	93.43	6.57	1,027,919,386	67,504,738	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100	10,000,000	9,984,000	99.84	0.16	10,000,000	16,000	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	24,862,000	24,000,000	96.53	3.47	24,862,000	862,000	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	100	223,768,000	214,754,000	95.97	4.03	223,768,000	9,014,000	Efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100	100	41,352,386	34,530,380	83.50	16.50	41,352,386	6,822,006	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	35,000,000	25,950,000	74.14	25.86	35,000,000	9,050,000	Efisien
PenyediaanBahan/Material	100	100	100	144,216,000	133,328,362	92.45	7.55	144,216,000	10,887,638	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	548,721,000	517,867,906	94.38	5.62	548,721,000	30,853,094	Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	250,823,000	229,541,973	91.52	8.48	250,823,000	21,281,027	Efisien
Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	100	100	100	250,823,000	229,541,973	91.52	8.48	250,823,000	21,281,027	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	1,022,941,000	932,546,519	91.16	8.84	1,022,941,000	90,394,481	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	10,000,000	9,900,000	99.00	1.00	10,000,000	100,000	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	280,131,000	224,210,519	80.04	19.96	280,131,000	55,920,481	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	732,810,000	698,436,000	95.31	4.69	732,810,000	34,374,000	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	158,692,958	156,292,910	98.49	1.51	158,692,958	2,400,048	Efisien
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	123,692,958	122,347,910	98.91	1.09	123,692,958	1,345,048	Efisien
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	100	100	35,000,000	33,945,000	96.99	3.01	35,000,000	1,055,000	Efisien
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100	100	100	664,808,000	648,939,970	97.61	2.39	664,808,000	15,868,030	Efisien
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	664,808,000	648,939,970	97.61	2.39	664,808,000	15,868,030	Efisien
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100	100	100	597,504,000	594,492,720	99.50	0.50	597,504,000	3,011,280	Efisien
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	67,304,000	54,447,250	80.90	19.10	67,304,000	12,856,750	Efisien
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100	100	100	7,997,740,250	5,518,674,300	69.00	31.00	7,997,740,250	2,479,065,950	Efisien
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100	100	100	50,500,000	47,064,500	93.20	6.80	50,500,000	3,435,500	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	100	100	50,500,000	47,064,500	93.20	6.80	50,500,000	3,435,500	Efisien
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	100	100	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	31.15	7,947,240,250	2,475,630,450	Efisien
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	100	100	100	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	31.15	7,947,240,250	2,475,630,450	Efisien
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100	100	100	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	0.40	9,785,790,400	38,712,869	Efisien
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	0.40	9,785,790,400	38,712,869	Efisien
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	100	100	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	0.40	9,785,790,400	38,712,869	Efisien
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100	100	100	11,179,889,000	11,054,180,500	98.88	1.12	11,179,889,000	125,708,500	Efisien
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	100	100	11,179,889,000	11,054,180,500	98.88	1.12	11,179,889,000	125,708,500	Efisien

Uraian	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dgn serapan	Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%				
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100	100	100	11,169,289,000	11,043,580,500	98.87	1.13	11,169,289,000	125,708,500	Efisien
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	100	100	100	10,600,000	10,600,000	100.00	-	10,600,000	0	Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100	100	100	647,552,000	605,340,185	93.48	6.52	647,552,000	42,211,815	Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100	100	100	647,552,000	605,340,185	93.48	6.52	647,552,000	42,211,815	Efisien
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100	100	100	647,552,000	605,340,185	93.48	6.52	647,552,000	42,211,815	Efisien
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	647,552,000	605,340,185	93.48	6.52	647,552,000	42,211,815	Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100	100	100	647,552,000	605,340,185	93.48	6.52	647,552,000	42,211,815	Efisien

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	65.85%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	44,66%	Menunjang
		Persentase kawasan kumuh	0.041%	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,91%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	100%	Menunjang
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	88.90%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88,9%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota		PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,71%	Menunjang
2	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	87.23%	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	74,43%	Menunjang
3	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	83 Skor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100%	Menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 8 program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

C. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan dan Fisik

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	Sisa Anggaran
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51,276,665,072	47,825,727,083	93.27	51,276,665,072	100.00	3,450,937,989
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50,629,113,072	47,220,386,898	93.27	50,629,113,072	100.00	3,408,726,174
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,091,109,678	13,759,202,857	97.64	14,091,109,678	100.00	331,906,821
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,930,829,000	2,741,837,250	93.55	2,930,829,000	100.00	188,991,750
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2,930,829,000	2,741,837,250	93.55	2,930,829,000	100.00	188,991,750
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	500,000,000	447,715,500	89.54	500,000,000	100.00	52,284,500
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2,430,829,000	2,294,121,750	94.38	2,430,829,000	100.00	136,707,250
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	11,160,280,678	100.00	142,915,071
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	11,160,280,678	100.00	142,915,071

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	Sisa Anggaran
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,160,280,678	11,017,365,607	98.72	11,160,280,678	100.00	142,915,071
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36,538,003,394	33,461,184,041	91.58	36,538,003,394	100.00	3,076,819,353
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,909,775,744	6,492,311,740	93.96	6,909,775,744	100.00	417,464,004
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136,013,400	128,103,500	94.18	136,013,400	100.00	7,909,900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110,100,000	102,713,500	93.29	110,100,000	100.00	7,386,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	14,680,000	97.87	15,000,000	100.00	320,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,913,400	10,710,000	98.14	10,913,400	100.00	203,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,257,593,000	4,030,462,990	94.67	4,257,593,000	100.00	227,130,010
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,219,553,000	3,992,716,990	94.62	4,219,553,000	100.00	226,836,010
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23,040,000	22,906,000	99.42	23,040,000	100.00	134,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	9,870,000	98.70	10,000,000	100.00	130,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5,000,000	4,970,000	99.40	5,000,000	100.00	30,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,793,000	54,949,200	98.49	55,793,000	100.00	843,800
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	49,775,000	49,084,200	98.61	49,775,000	100.00	690,800
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6,018,000	5,865,000	97.46	6,018,000	100.00	153,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,027,919,386	960,414,648	93.43	1,027,919,386	100.00	67,504,738
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,984,000	99.84	10,000,000	100.00	16,000

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	Sisa Anggaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,862,000	24,000,000	96.53	24,862,000	100.00	862,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223,768,000	214,754,000	95.97	223,768,000	100.00	9,014,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,352,386	34,530,380	83.50	41,352,386	100.00	6,822,006
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	25,950,000	74.14	35,000,000	100.00	9,050,000
Penyediaan Bahan/Material	144,216,000	133,328,362	92.45	144,216,000	100.00	10,887,638
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548,721,000	517,867,906	94.38	548,721,000	100.00	30,853,094
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250,823,000	229,541,973	91.52	250,823,000	100.00	21,281,027
Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	250,823,000	229,541,973	91.52	250,823,000	100.00	21,281,027
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,022,941,000	932,546,519	91.16	1,022,941,000	100.00	90,394,481
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	9,900,000	99.00	10,000,000	100.00	100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,131,000	224,210,519	80.04	280,131,000	100.00	55,920,481
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	732,810,000	698,436,000	95.31	732,810,000	100.00	34,374,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,692,958	156,292,910	98.49	158,692,958	100.00	2,400,048
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123,692,958	122,347,910	98.91	123,692,958	100.00	1,345,048
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35,000,000	33,945,000	96.99	35,000,000	100.00	1,055,000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	664,808,000	648,939,970	97.61	664,808,000	100.00	15,868,030
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	67,304,000	54,447,250	80.90	67,304,000	100.00	12,856,750

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	Sisa Anggaran
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	67,304,000	54,447,250	80.90	67,304,000	100.00	12,856,750
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	597,504,000	594,492,720	99.50	597,504,000	100.00	3,011,280
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	597,504,000	594,492,720	99.50	597,504,000	100.00	3,011,280
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7,997,740,250	5,518,674,300	69.00	7,997,740,250	100.00	2,479,065,950
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50,500,000	47,064,500	93.20	50,500,000	100.00	3,435,500
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50,500,000	47,064,500	93.20	50,500,000	100.00	3,435,500
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	7,947,240,250	100.00	2,475,630,450
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	7,947,240,250	100.00	2,475,630,450
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	9,785,790,400	100.00	38,712,869
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	9,785,790,400	100.00	38,712,869
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9,785,790,400	9,747,077,531	99.60	9,785,790,400	100.00	38,712,869
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11,179,889,000	11,054,180,500	98.88	11,179,889,000	100.00	125,708,500
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11,179,889,000	11,054,180,500	98.88	11,179,889,000	100.00	125,708,500
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11,169,289,000	11,043,580,500	98.87	11,169,289,000	100.00	125,708,500
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	10,600,000	10,600,000	100.00	10,600,000	100.00	0

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	Fisik (%)	Sisa Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	647,552,000	605,340,185	93.48	647,552,000	100.00	42,211,815
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	647,552,000	605,340,185	93.48	647,552,000	100.00	42,211,815
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	647,552,000	605,340,185	93.48	647,552,000	100.00	42,211,815
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	647,552,000	605,340,185	93.48	647,552,000	100.00	42,211,815
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	647,552,000	605,340,185	93.48	647,552,000	100.00	42,211,815

Dari analisis realisasi Fisik dan Keuangan, untuk Kegiatan Fisik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terlaksana 100% untuk 8 Program, sedangkan untuk realisasi Keuangan terdapat 8 Program yang belum 100%. Sedangkan Perbandingan Realisasi Fisik tahun 2025 dengan tahun 2024 tetap sama **yaitu 100%**. Sedangkan Realisasi Keuangan menurun **tahun 2025 yaitu 93,27% dengan sisa anggaran 3,450,937,989**.

D. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan awasan Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh	801	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa	100	Setiap tahun	2,981,329,000

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	minum sehari-hari	Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			dan sumber daya manusia			
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,868	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	11,160,280,678

c. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut :

Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber dana Lain yang sah
1	2	3	4	5	6
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1,252,538,000		1,728,791,000	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	2,740,609,928		8,419,670,750	
Jumlah		3,993,147,928		10,148,461,750	

d. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah menerapkan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	801 Orang	801 Orang	100%	2,981,329,000	2,741,837,250	92

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	2,868 Orang	2,868 Orang	100%	11,160,280,678	11,017,365,607	99
Jumlah					14,141,609,678	13,759,202,857	

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 97,64%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar sebesar 80% pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	801 Orang	801 Orang	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan	2,868 Orang	2,868 Orang	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
	pengolahan Air Limbah Domestik				

Presentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			100	20
	Jaringan Perpipaan				20%
	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	193 Rumah Tangga	193 Rumah Tangga	100	

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	193 Rumah Tangga	193 Rumah Tangga	100	
	Bukan Jaringan Perpipaan				
	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	74 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga	100	
	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	74 Rumah Tangga	74 Rumah Tangga	100	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik			100	20
	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	956 Rumah Tangga	956 Rumah Tangga	100	20%
	kualitas Pelayanan Akses Aman > 25 jiwa/hektar (SPALD-S)	279 Rumah Tangga	279 Rumah Tangga	100	
	kualitas Pelayanan Akses Aman < 25 jiwa/hektar (SPALD-S)	677 Rumah Tangga	677 Rumah Tangga	100	

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 15 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80	20	100	TUNTAS UTAMA
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	80	20	100	TUNTAS UTAMA
BIDANG URUSAN PUPR				100	Tuntas Utama

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar **100** dengan kategori **Tuntas Utama**, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah mencapai 100% di tahun 2025.

e. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Permasalahan dan Solusi SPM

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Sulitnya mencari sumber air baku di kawasan Kendeng Selatan - Alokasi anggaran APBD yang terbatas	- Rekayasa alam dengan pembuatan embung ataupun sumur resapan - Pengusulan anggaran dari APBN, DAK, Hibah, CSR ataupun yang lainnya
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Keterbatasan lahan desa dan topografi untuk area pengolahan limbah komunal	Penganggaran APBD untuk pembebasan lahan
EKSTERNAL			
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	-	-

2. Urusan Perumahan Rakyat

a. Jenis Layanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan secara teknis

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	760	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	597,504,000

No.	Jumlah Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target (orang)	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target (%)	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kotayang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100	Setiap tahun	67,304,000

c. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut :

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber dana Lain yang sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	597,504,000			
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67,304,000			
Jumlah		664,808,000			

d. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah menerapkan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 19 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	760 Unit	760 Unit	100	597,504,000	594,492,720	99.50
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit dilakukan pendataan karena tidak ada relokasi bencana	100	67,304,000	54,447,250	80.90
Jumlah					664,808,000	648,939,970	98

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 98%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar sebesar 80% pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang Harus Dilayani (orang)	Jumlah yang Terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	760	760	100	80
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	0 dilakukan pendataan karena tidak ada relokasi bencana	100	80

Persentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	190	190	100	20
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	0 dilakukan pendataan karena tidak ada relokasi bencana	100	20

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel 3. 22 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	IP Layanan (%)	IP Mutu (%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Utama
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Utama
BIDANG URUSAN PERAKIM				100	Tuntas Utama

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori **Tuntas Utama** hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada dinilai kurang dari 100%

e. Permasalahan Dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Permasalahan Dan Solusi SPM

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Alokasi anggaran APBD yang terbatas -Lokasi Bencana yang susah dijangkau	Melakukan sinkronisasi pendataan, dan koordinasi dengan OPD terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan sehingga dapat dilakukan penanganan bencana lebih cepat
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Tidak adanya kegiatan dan anggaran yang dilakukan -Tidak ada bencana yang menyebabkan relokasi rumah ke desa lain.	Usulan kegiatan dan penganggaran Di Perubahan untuk kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
EKSTERNAL			
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Tujuan Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 77,17% (kategori sangat tinggi).
 - 1. Sasaran Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar Persentase rumah layak huni 65,85% dan Persentase kawasan kumuh 0.041 % (kategori sangat tinggi)
 - 2. Sasaran Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota 88.90% dan Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 78,62% (kategori sangat tinggi)

3. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan sebesar 87.23% (kategori sangat tinggi)

B. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 75,80 Nilai (kategori Sangat Baik)

1. Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai IKM sebesar 83 SKOR (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 51.276.665.072 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 47.825.727.083 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 93,27% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,73%.

Untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dengan Anggaran Rp. 14,141,609,678 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 13,759,202,857 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran SPM sebesar 97,29% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,71%.

Urusan Perumahan Rakyat dengan Anggaran Rp. 664,808,000 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 648,939,970 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran SPM sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Februari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SETYO HADI
Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025



Pihak Kedua,

SETYO HADI

Pihak Pertama,

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Perubahan Tahun 2025
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	64.00%	64.10%
		Persentase kawasan kumuh	0,043%	0,043%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	88.90%	88.90%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78.62%	78.62%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	76.92%	76.92%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai IKM	80 Skor	80 Skor

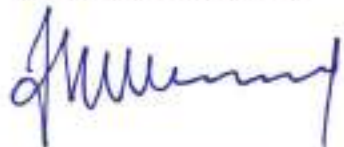
	Program	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2025	Perubahan Tahun 2025	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Rp6,064,516,000	Rp2,981,329,000	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp12,685,179,000	Rp11,160,280,678	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6,276,064,600	Rp6,909,775,744	
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp278,208,000	Rp664,808,000	
5	Program Kawasan Permukiman	Rp1,900,000,000	Rp7,947,240,250	
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp5,077,478,400	Rp9,785,790,400	

7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp9,594,939,000	Rp11,179,889,000	
8	Program Penatagunaan Tanah	Rp447,552,000	Rp647,552,000	
Jumlah		Rp42,323,937,000	Rp51,276,665,072	


 BUPATI GROBOGAN,

 SETYO HADI

Purwodadi, September 2025
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN GROBOGAN


 ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730726 199803 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 31 Januari 2025



Pihak Kedua,

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Pihak Pertama,

Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691003 199803 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Target Tahun 2025
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100%	100%
		Persentase Laporan keuangan sesuai Standart Akuntansi Publik	100%	100%
		Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen risiko	100%	100%
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terusun	100%	100%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150,111,000	Rp 95,000,000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3,609,949,000	Rp 4,024,782,000	
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 136,600,000	Rp 135,307,000	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,138,647,742	Rp 1,137,695,642	
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Rp 137,982,000	
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 427,899,500	Rp 551,320,000	

g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	742,426,240	Rp	193,977,958	
	Jumlah	Rp	6,205,633,482	Rp	6,276,064,600	



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Purwodadi, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691003 199803 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARLAN, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Pihak Pertama,

DARLAN, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680514 198903 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	88%	88,90%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	20 unit
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	72,55%	72,71%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	351451 Rumah Tangga	352241 Rumah Tangga
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	40,11%	44,66%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	7 Ha	7 Ha
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	37,50%	45,83%

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 7.272.490.000	Rp 6.064.516.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.272.490.000	Rp 6.064.516.000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 12.534.404.368	Rp 12.685.179.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.534.404.368	Rp 12.685.179.000	
	Program Kawasan Permukiman		Rp 1.900.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	Rp 1.900.000.000	
	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 11.327.720.450	Rp 9.584.339.000	
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 11.327.720.450	Rp 9.584.339.000	
	Jumlah	Rp 31.134.614.818	Rp 28.334.034.000	


ENDANG SULISTYONINGIH, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda (IV/e)
 NIP. 19730726 199803 2 006

Purwodadi, 3 Januari 2024
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

DARLAN, ST, NT
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680514 198903 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UPIK FARIDA SURYA DONA, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025



Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

UPIK FARIDA SURYA D, ST.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790822 200501 2 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
	Program Pengembangan Perumahan			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kesiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat	100%	100%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dibangun	350 Unit Rumah	238 Unit Rumah
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	29.17	45.83%

No	Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Anggaran 2025	Keterangan
	Program Pengembangan Perumahan			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 21,320,000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 740,950,000	Rp 256,888,000	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8,966,785,000	5,077,478,400	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 25,000,000	Rp 10,600,000	
	Jumlah	Rp 9,732,735,000	Rp 5,366,286,400	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Purwodadi, 31 Januari 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN



UPIK FARIDA SURYA DONA, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790822 200501 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN KAWASAN
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan
Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 3 Januari 2025



Pihak Kedua,

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Pihak Pertama,

AGUS PANCA N, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19770508 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN KAWASAN LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	42,86%	74,43%
1.	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		KETERANGAN
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Program Penatagunaan Tanah	Rp 2.376.722.700	Rp 447.552.000	
1.	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.376.722.700	Rp 447.552.000	



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

Purwodadi, 3 Januari 2025
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN
PENATAAN KAWASAN LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

AGUS PANCA N, S.T., M.T.

Pembina (IV/a)
NIP. 19770508 200604 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BHISMA SYAHPUTRA MOHAMAD, S.STP, M.A.P
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Pembina Tk. I (IV/b)

BHISMA SYAHPUTRA M, S.STP, M.A.P
Penata Muda Tk. I (III/c)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun	Target Tahun
			2024	2025
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintah daerah meliputi administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa	100%	100%
		Persentase pemenuhan dokumen arca penilaian manajemen resiko	100%	100%
		Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	100%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang tersusun	100%	100%
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4 Laporan
2)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2 Laporan
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	34 Orang/bulan
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3 Laporan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Rp	60,000,000	
	Penyusunan Renstra 2025-2029		Rp 60,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000	

	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Rp	5,000,000	Rp	15,000,000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	145,111,000	Rp	20,000,000	
	Penyusunan SAKIP, IKM, dan SPIP	Rp	145,111,000	Rp	20,000,000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3,577,069,000	Rp	3,976,742,000	
	Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK	Rp	3,577,069,000	Rp	3,976,742,000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	17,880,000	Rp	23,040,000	
	Belanja Honorarium Pengelola BMD dan Bendahara Pengeluaran	Rp	17,880,000	Rp	23,040,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	7,500,000	Rp	10,000,000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	7,500,000	Rp	10,000,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	7,500,000	Rp	15,000,000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Rp	7,500,000	Rp	15,000,000	
	Jumlah	Rp	3,760,060,000	Rp	4,119,782,000	

SEKRETARIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

Ir. TRI RETHO INDRIATI, MP
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 19691003 199801 2 005

Purwodadi, 31 Januari 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

BHISMA SYAHPUTRA MOHAMAD, S. STP, M. A.P
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19960719 201808 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
AHLI MUDA, TUGAS TAMABAHAN SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDY LEKSONO, ST, MT
Jabatan : Fungsional Penata kelola Bangunan Gedung dan kawasan Permukiman Ahli Muda
Tugas Tambahan : Subkoordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DARLAN, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 31 Januari 2025



Pihak Kedua,

DARLAN, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19680514 198903 1 006

Pihak Pertama,

RUDY LEKSONO, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19730515 200501 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNGDAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA
TUGAS TAMBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang terbangun	20 unit	20 unit
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 SR	320 SR
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	2 Desa	2 Desa
b.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang telah terlayani sistem Air Limbah Domestik yang layak	351451 Rumah Tangga	352241 Rumah Tangga
1)	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	435 Rumah Tangga	435 Rumah Tangga

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,272,490,000	Rp 6,064,516,000	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp 1,303,950,000	-	
	Pembangunan Sumur Peresapan Untuk Pemanenan Air Hujan	Rp 1,303,950,000	-	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	Rp 300,000,000	
	Pembangunan Sumur Air Dangkal Pedesaan	-	Rp 300,000,000	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 5,968,540,000	Rp 5,764,516,000	
	Uprating Instalasi Pengolahan Air Minum Pedesaan (DAK Bidang Air Minum)	Rp 5,968,540,000	Rp 5,764,516,000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,534,404,368	Rp 12,685,179,000	

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp	12,534,404,368	Rp	12,685,179,000	
Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik DAK Sanitasi dan HALS	Rp	12,534,404,368	Rp	12,685,179,000	
Jumlah	Rp	19,806,894,368	Rp	18,749,695,000	



KEPALA BIDANG
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

DARLAN, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19680514 198903 1 006

Purwodadi, 31 Januari 2025

"NAMA JABATAN FUNGSIONAL"
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RUDY LEKSONO, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19730515 200501 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA, TUGAS TAMBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHOMAN KHABIB YULIANTO, S.T.
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
Tugas : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kawasan
Tambahan : Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DARLAN, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua,

DARLAN, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)

NIP. 19680514 198903 1 006

Pihak Pertama,

SHOMAN KHABIB Y, S.T.
Penata (III/c)
NIP. 19810709 201502 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA
TUGAS TAMBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun	Target Tahun
			2024	2025
	Program Kawasan Permukiman		40,11%	44,66%
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	7 Ha	7 Ha
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	1 Ha	1 Ha
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%
2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	37,50 %	45,83%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	68 Lokasi	34 Lokasi

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	Program Kawasan Permukiman		Rp 1.900.000.000	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp 1.900.000.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Rp 1.900.000.000	
	Penataan Lingkungan untuk Penanganan Permukiman Kumuh (10 Lokasi)		Rp 1.900.000.000	
	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 11.302.720.450	Rp 9.584.339.000	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 11.306.320.450	Rp 9.584.339.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 11.306.320.450	Rp 9.584.339.000	
	Jasa Konsultansi	Rp 180.360.000	Rp 187.260.000	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	Rp 477.560.450	Rp 558.779.000	
	Penataan Lingkungan	Rp 10.648.400.000	Rp 8.838.300.000	
	Jumlah	Rp 11.302.720.450	Rp 9.584.339.000	

Purwodadi,

Januari 2025

KEPALA BIDANG
 KAWASAN PERMUKIMAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN GROBOGAN


 DARLAN, S.T., M.T.
 Peminta (IV/a)
 NIP. 19680514 198903 1 006

PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA
 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN


 SHOMAN KHAIIRI JULIANTO, S.T.
 Peminta (III/c)
 NIP. 19810709 201502 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TERAMPIL ARSIPARIS
SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. AJENG NOVIA NINGTYAS, A.Md
Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGIARSI, SH
Jabatan : Kepala Subbag Umum
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 3 Januari 2025



Pihak Kedua,

SUGIARSI, SH

Kepala Subbag Umum
NIP. 19710701 200604 2 021

Pihak Pertama,

A. AJENG NOVIA NINGTYAS, A.Md

Terampil Arsiparis
NIP. 19851106 202421 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TERAMPIL ARSIPARIS
SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat	100%	100%
1)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	.		
2)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN


SUGIARSI, SH
Pegata Tk. I (III/d)
NIP. 19710701 200604 2 021

Purwodadi, 3 Januari 2025
TERAMPIL ARSIPARIS
SEKRETARIAT



A. AJENG NOVIA NINGTYAS, A.Md
Terampil Arsiparis
NIP.19851106 202421 2 003

LAMPIRAN RAKOR LAPORAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-eldperakim.grobogan@gmail.com

Judul Rapat : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2025 & Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2026
Tanggal : Senin, 10 November 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Disperakim Kab. Grobogan
Pimpinan Rapat: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Peserta Rapat : 1. Sekretaris dan Kabid di Lingkungan Disperakim
2. Kasubag, Subkordinator, dan ASN di Lingkungan Disperakim

Agenda :

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025.
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan TA 2026 (perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan money).
3. Isu/kendala lintas bidang serta kebutuhan dukungan.
4. Penetapan rencana tindak lanjut dan jadwal.

Ringkasan Pembahasan dan Keputusan Rapat:

1. Per 8 November 2025, capaian fisik mencapai 83,41% dan realisasi keuangan 62%. Kepala Dinas mendorong percepatan penyerapan anggaran khususnya kegiatan fisik dengan perencanaan yang lebih rinci serta eksekusi lapangan yang terukur. Diminta monitoring berkelanjutan terhadap kegiatan yang penyerapan anggarannya masih rendah, sehingga potensi melewati lintasan kritis atau hambatan di lapangan bisa terdeteksi dini dan ditangani tepat waktu. Setiap bidang diminta memastikan bahwa kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan dapat terserap semaksimal mungkin. Penyelesaian kegiatan fisik diharapkan selesai sebelum tanggal 14 Desember 2025.
2. Tindak lanjut: Akan dilakukan rapat kembali pada tanggal 24 November 2025 untuk memperbarui progres penyerapan anggaran dan mengevaluasi hasil monitoring masing-masing bidang.

Demikian notulen rapat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 10 November 2025
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



Darlan, S.T., M.T.
NIP : 19680514 198903 1 006

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 29 Des 2025)	%		
	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau, akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan			1. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%									
1		1. Meningkatkan rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman		1.1 Persentase rumah layak huni	%									
				1.2 Persentase kawasan kumuh	%									
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%									
				Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%									
				Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	%									
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	%									
			1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersehat	Unit Rumah	150	150.00	150.00	100.00	507,504,000	589,740,720	98.70	Sidang Perumahan	
			1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	1.00	1.00	100.00	67,304,000	36,516,000	54.85	Sidang Perumahan	
			1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dilayani	%									
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Ha									
			1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Pemajajuan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dimajajkan/Dipugar	Ha	2.66	2.66	2.66	100.00	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	Sidang Kawasan Permukiman	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 29 Des 2025)	%		
	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau, akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan			1. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%									
1		1. Meningkatkan rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman		1.1 Persentase rumah layak huni	%									
				1.2 Persentase kawasan kumuh	%									
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%									
				Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%									
				Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	%									
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase rumah korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	%									
			1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersehat	Unit Rumah	150	150.00	150.00	100.00	507,504,000	589,740,720	98.70	Sidang Perumahan	
			1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	1.00	1.00	100.00	67,304,000	36,516,000	54.85	Sidang Perumahan	
			1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang dilayani	%									
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditingkatkan kualitas lingkungannya	Ha									
			1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Pemajakan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dimajakan/Dipugar	Ha	2.66	2.66	2.66	100.00	7,947,240,250	5,471,609,800	68.85	Sidang Kawasan Permukiman	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

[illegible]

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 30 Des 2025)	%		
			Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai IKM	Skor									
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%									
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja urusan pemerintahan daerah meliputi administrasi keuangan administrasi umum penyediaan jasa penunjang pemeliharaan BMD	%									
				Persentase pemenuhan dokumen area penilaian manajemen resiko	%									
			1.04.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%									
			1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6,00	6,00	100,00	110,100,000	102,713,500	93,29	Sekretariat	
			1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4,00	4,00	100,00	15,000,000	14,680,000	97,87	Sekretariat	
			1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2,00	2,00	100,00	10,913,400	10,710,000	98,14	Sekretariat	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 20 Des 2025)	%		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%									
			1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	34.00	34.00	100.00	4,216,553,000	3,858,086,085	91.57	Sekretariat	
			1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12.00	12.00	100.00	23,040,000	22,906,000	99.42	Sekretariat	
			1.04.01.2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.00	1.00	100.00	10,000,000	9,670,000	96.70	Sekretariat	
			1.04.01.2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2.00	2.00	100.00	6,000,000	4,970,000	82.83	Sekretariat	
			1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	%									
			1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2.00	2.00	100.00	49,775,000	49,084,200	98.61	Sekretariat	
			1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	51	51.00	51.00	100.00	6,018,000	5,860,000	97.48	Sekretariat	
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%									
			1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.00	1.00	100.00	10,000,000	9,984,000	99.84	Sekretariat	
			1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.00	1.00	100.00	24,862,000	13,380,000	53.70	Sekretariat	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No	Kinerja													Pengampu	Feedback
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 30 Des 2025)	%		
					1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.00	1.00	100.00	223,788,000	200,024,000	89.39	Sekretariat	
					1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.00	1.00	100.00	41,352,388	33,430,380	80.64	Sekretariat	
					1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4.00	4.00	100.00	35,000,000	24,660,000	70.43	Sekretariat	
					1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3.00	3.00	100.00	144,216,000	131,328,362	91.06	Sekretariat	
					1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12.00	12.00	100.00	548,721,000	489,621,406	89.06	Sekretariat	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%									
				1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	30.00	30.00	30.00	100.00	250,823,000	229,541,973	91.52	Sekretariat	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%									
				1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2.00	2.00	2.00	100.00	10,000,000	9,900,000	99.00	Sekretariat	
				1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12.00	12.00	12.00	100.00	280,131,000	224,210,519	80.04	Sekretariat	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback	
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 20 Des 2025)			%
				1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.00	12.00	100.00	732.510.000	285.930.000	39.43	Sekretaris	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%									
				1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27.00	27.00	100.00	123.692.958	112.274.733	90.77	Sekretariat	

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Kinerja													Pengampu	Feedback	
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 20 Des 2025)	%			
					1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25,00	25,00	100,00	35,000,000	31,586,000	90,27	Sekretariat	
TOTAL												61,276,665,072	44,944,001,693			

Faktor Keberhasilan

1. Beberapa target triwulanan seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur dasar permukiman, serta program penataan kawasan kumuh telah menunjukkan progres signifikan sesuai dengan rencana kerja.
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, sehingga kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
3. Progres fisik kegiatan tetap berjalan dan menunjukkan capaian positif, meskipun proses administrasi keuangan masih berlangsung. Proses administrasi seperti pengadaan, kontrak, dan pencairan anggaran berjalan lebih cepat.

Faktor Kegagalan

1. Masih ada beberapa proyek yang terkendala revisi dokumen administrasi sehingga menyebabkan deviasi jadwal.
2. Kendala cuaca sedikit mempengaruhi progres fisik di lapangan.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mempercepat penyelesaian progres fisik kegiatan sesuai kontrak agar segera dapat dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan BPKAD dan pihak terkait untuk memastikan proses administrasi pencairan dapat berjalan optimal di akhir tahun anggaran.
3. Menyusun dan mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan terkait permohonan keterlambatan pengajuan SPP dan SPM di akhir tahun anggaran, sebagai bentuk kepatuhan administrasi dan mitigasi risiko temuan.

Grobogan, 20 Desember 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan


ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.M.T
Pembina Utama Muda (IV/C)
19730726 199803 2 005

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Kinerja												Pengampu	Feedback		
	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	%	Pagu	Realisasi s.d TW 4 (Per 20 Des 2025)			%	
					1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25.00	25.00	100.00	35.000.000	31.595.000	90.27	Sekretariat	
TOTAL												51,276,665,072	44,944,001,693			

Faktor Keberhasilan

1. Beberapa target triwulanan seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur dasar permukiman, serta program penataan kawasan kumuh telah menunjukkan progres signifikan sesuai dengan rencana kerja.
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, sehingga kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
3. Progres fisik kegiatan tetap berjalan dan menunjukkan capaian positif, meskipun proses administrasi keuangan masih berlangsung. Proses administrasi seperti pengadaan, kontrak, dan pencairan anggaran berjalan lebih cepat.

Faktor Kegagalan

1. Masih ada beberapa proyek yang terkendala revisi dokumen administrasi sehingga menyebabkan deviasi jadwal.
2. Kendala cuaca sedikit mempengaruhi progres fisik di lapangan.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mempercepat penyelesaian progres fisik kegiatan sesuai kontrak agar segera dapat dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan BPKAD dan pihak terkait untuk memastikan proses administrasi pencairan dapat berjalan optimal di akhir tahun anggaran.
3. Menyusun dan mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan terkait permohonan keterlambatan pengajuan SPP dan SPM di akhir tahun anggaran, sebagai bentuk kepatuhan administrasi dan mitigasi risiko temuan.

Grobogan, 20 Desember 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T.M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
19730726 199803 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-el dperakim.grobogan@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Karyawan dan Karyawati Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan
Dari : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan
Tembusan : -
Tanggal : 17 Desember 2025
Nomor : 600.2/140/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Dengan ini, kami mengharap kehadiran saudara besok pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Desember 2025
Jam : 12.30 WIB – Selesai
Tempat : Aula Kantor Disperakim Kab. Grobogan
Acara : Rapat Monitoring & Evaluasi Penyerapan Anggaran TA. 2025 dan
Pembahasan Hasil Akhir Prasurvey Kegiatan TA. 2026

Demikian untuk mendapat perhatian dan diindahkan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,



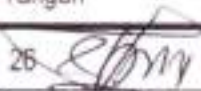
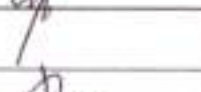
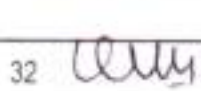
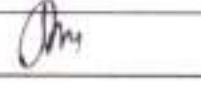
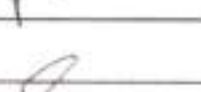
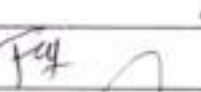
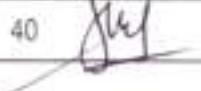
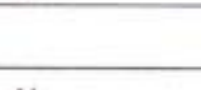
Telah ditandatangani
secara elektronik oleh

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006

DAFTAR HADIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
 Waktu : 12.30 WIB - selesai
 Tempat : Aula Kantor Disperakim Kabupaten Grobogan
 Acara : Rapat Monitoring & Evaluasi Penyerapan Anggaran TA. 2025 dan Pembahasan Hasil Akhir Prasurvey Kegiatan TA. 2026

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
1	Emong	Kadis	1
2	Danba	Sekdis	2
3			3
4	Nurika Faira		4
5	Supadi	Disperakim	5
6	Sugiono		6
7	Alif Nur H		7
8	Lila W		8
9	Iffa F		9
10	Sigit Budi P		10
11	Siti Mursamingrum		11
12	M. Amur Tamiq		12
13	Andreas R. Y		13
14	Yulius K H		14
15	Martina Indah.		15
16	Ferry Ag W.		16
17	Dini Fay		17
18	Reni Wahyu		18
19	M. Zulf. E		19
20	Aseng		20
21	Alviki Dan. P		21
22	Tri Wahyuni		22
23	Edi Pratomo		23
24	Firdaus Iqbal		24
25	Pko Apis G		25

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
26	Akhilis Aulio R		26 
27	Azila Huda		27 
28	Shoren K.Y		28 
29	Dhuli Krestrowi		29 
30	Achmad Zam		30 
31	IR - M		31 
32	Timbul M		32 
33	Unggul X		33 
34	Fajri Zuhriat		34 
35	Bagus Setiya H.		35 
36	Nanda A F		36 
37	Rahma R		37 
38	Masrip Fery		38 
39	Turmudi		39 
40	Hanik R		40 
41	Joko S		41 
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

a.n Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Sekretaris



DARLAN S.T., M.T.
NIP. 19680514 198903 1 006





LAMPIRAN

SK IKU

2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jl. Dr. Sutomo No.10, Purwodadi – Grobogan . 50111
Telp. (0292) 5140756 Fax (0292) 422012

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 050/528.1/2021**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI

Pada tanggal

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan



Drs. SISWANTO, MM

NIP. 19640618 199403 1 005

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan

Nomor

Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan

1. Nama Unit Organisasi : Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan


Drs. SISWANTO, MM
NIP. 19640618 199403 1 003

Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100	%	62,54	62,88	63,16	63,44	63,72	64,00	64,28	
		Persentase kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh (SK Bupati) dibagi luas wilayah dikali 100	%	0,068 (SK Lama)	0,057 (SK Baru)	0,054	0,050	0,047	0,043	0,040	
2.	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali 100	%	84,40	85,30	86,20	87,10	88,00	88,90	89,80	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/ Kota dikali 100	%	76,54	75,56	78,57	78,59	78,60	78,62	78,63	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan dibagi jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemerintah Daerah dikali 100	%	0	0	0	23,08	46,15	76,92	100
4.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan & kualitas pelayanan publik didukung dgn manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yg baik	Skor nilai SKM	Score Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey	Score	76,67	76,67	78	79	80	81	82

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan


Drs. SISWANTO, MM
NIP. 19640618 199403 1 005